

MEMBANGUN PENDIDIKAN WARGA YANG KRITIS TENTANG DEMOKRASI DAN HAM

M. Fatwa¹, Mukhrodi², Istinaroh³, Nur Khasan⁴

Sekolah Tinggi Islam Darul Amanah Kendal, Jawa Tengah^{1,2,3,4}

e-mail: fatwada878@gmail.com, mukhrodialfaqir@gmail.com,
istinarohrocketmail@gmail.com, nkhasan211@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti polarisasi politik, rendahnya literasi warga, serta maraknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pendidikan tentang demokrasi dan HAM belum berjalan optimal dan sering kali kurang kontekstual dengan realitas sosial, sehingga pengembangan kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan mendesak agar warga mampu berpartisipasi aktif, reflektif, serta memahami nilai-nilai demokrasi secara lebih mendalam. Guru memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme, toleransi, dan sikap demokratis siswa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kritis mengenai demokrasi dan HAM menjadi langkah penting untuk membentuk masyarakat yang sadar, adil, inklusif, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan bernegara. Upaya ini perlu didukung dengan pendekatan partisipatif, peningkatan kapasitas guru, serta keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Selain itu, pengembangan literasi media dan kemampuan reflektif turut membantu siswa memahami, menginternalisasi, serta mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan HAM secara berkelanjutan di era digital.

Kata Kunci: *Membangun, Pendidikan, Warga, Kritis, Demokrasi, HAM*

ABSTRACT

Democracy in Indonesia provides broad opportunities for citizens to express their aspirations and participate in national life. However, it still faces various challenges such as political polarization, low civic literacy, and frequent violations of human rights (HR). Education on democracy and HR has not been implemented optimally and often lacks contextual relevance to social realities. Therefore, developing critical thinking skills is an urgent necessity so that citizens can participate actively, reflectively, and understand democratic values more profoundly. Teachers hold a strategic role in fostering students' sense of nationalism, tolerance, and democratic attitudes within educational environments. Strengthening critical education on democracy and HR is thus essential to build a conscious, fair, inclusive, and responsible society. These efforts must be supported through participatory approaches, teacher capacity building, and the involvement of families, educational institutions, and the wider community. Furthermore, developing media literacy and reflective abilities helps students internalize and implement democratic and human rights values sustainably in the digital era.

Keywords: *Building, Education, Citizens, Critical, Democracy, Human Rights*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami berbagai sistem pemerintahan, namun demokrasi dianggap paling sesuai karena memberikan ruang bagi rakyat biasa untuk menyuarakan pendapat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi. Meski demikian, demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan serius seperti kurangnya masyarakat sipil yang mampu mengawasi kekuasaan secara kritis, lemahnya regenerasi dalam partai politik, hilangnya peran

oposisi yang efektif, tingginya biaya pemilu akibat praktik politik uang, serta maraknya hoaks dan informasi palsu (Aspinall & Berenschot, 2019). Selain itu, rendahnya etika politik warga, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan media dan berkumpul, serta intoleransi terhadap kelompok minoritas turut memperburuk kondisi. Situasi ini diperparah oleh polarisasi politik yang tajam, yang memecah masyarakat menjadi dua kelompok dan membuat kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai tindakan melawan. Padahal, suara kritis sangat penting sebagai pengontrol kekuasaan demi kesehatan demokrasi (Patra, 2022).

Begitu juga dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia juga masih terjadi, terutama di kalangan pelajar, dengan kasus-kasus kekerasan, *bullying*, diskriminasi, dan eksploitasi yang terus muncul. Walaupun HAM sudah diakui dalam konstitusi Indonesia, penerapannya dalam sistem pendidikan formal masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya sekolah yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Materi tentang HAM sering kali diajarkan secara terpisah dan belum menjadi bagian utama dalam pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan atau mata pelajaran lain, sehingga pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia tidak berkembang secara menyeluruh dan mendalam (Muhtaj et al., 2020).

Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan melalui mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dari tingkat dasar hingga menengah saat ini cenderung hanya fokus pada aspek pengetahuan saja. Materi yang disampaikan kurang proporsional, tidak disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata, dan minim dalam memberikan ruang untuk eksplorasi lebih dalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran PPKn masih bersifat kognitif dan belum menyentuh ranah afektif serta psikomotor yang penting untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis (Sitepu et al., 2023). Padahal, pendidikan seharusnya berperan penting dalam membekali siswa agar menjadi warga yang aktif dan mampu berkontribusi dalam sistem demokrasi serta menghargai hak asasi manusia.

Pendidikan yang membentuk warga negara agar mampu berpikir kritis tentang demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, dengan sejarah panjang perjuangan demokrasi dan penghormatan HAM, pendidikan jenis ini menjadi alat utama untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang menumbuhkan kemampuan kritis membantu individu untuk tidak hanya pasif menerima informasi, melainkan juga mampu menganalisis, menilai, dan ikut serta secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan cara ini, masyarakat dapat terhindar dari pengaruh informasi yang menyesatkan dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia (Ismayanti et al., 2019).

Guru memegang peranan kunci dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan siswa. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengedepankan pemikiran kritis dan disesuaikan dengan konteks nyata, guru dapat membantu siswa untuk lebih memahami serta menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, sekaligus mengajak mereka berperan aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan yang mendorong kesadaran kritis terhadap demokrasi dan HAM sangat penting dan mendesak agar warga negara Indonesia mampu berkontribusi secara penuh dan bertanggung jawab dalam menciptakan bangsa yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi setiap individu (Berlian & Dewi, 2021). Tulisan ini akan mengulas lebih dalam mengenai pentingnya pendidikan warga yang sadar dan kritis terhadap demokrasi dan HAM khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai pendidikan warga yang kritis terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema pendidikan demokrasi, HAM, dan pengembangan berpikir kritis. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data pustaka dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan mutakhir, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama seperti konsep demokrasi, pendidikan HAM, dan pendidikan kritis. Selanjutnya dilakukan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi hubungan antar konsep serta menemukan gagasan baru dari berbagai literatur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merumuskan model konseptual pendidikan warga yang kritis terhadap demokrasi dan HAM sebagai hasil sintesis dari berbagai teori dan temuan pustaka. Melalui metode ini, peneliti berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penguatan pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kurangnya pendidikan kritis warga terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia merupakan masalah kompleks yang berakar pada berbagai faktor sosial, politik, dan pendidikan. Rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat dan kurangnya ruang partisipatif di sekolah membuat kesadaran terhadap nilai-nilai demokrasi sulit berkembang secara mendalam. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan turut membatasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. Penyebab utama kurangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap demokrasi dan HAM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebab Kurangnya Pendidikan Kritis

No.	Penyebab
1.	Kualitas Pendidikan Kewarganegaraan yang Terbatas
2.	Kurangnya Integrasi Nilai Demokrasi dan HAM dalam Kurikulum
3.	Pengaruh Budaya Politik Patronase dan Otoritarian
4.	Keterbatasan Akses dan Literasi Media
5.	Minimnya Pendidikan Kritis di Luar Sekolah
6.	Keterbatasan Peran Lembaga Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Kritis

Pendidikan kritis tentang demokrasi dan HAM di Indonesia masih lemah karena sistem pembelajaran yang terlalu menekankan hafalan tanpa mendorong analisis mendalam. Kurikulum pun belum sepenuhnya menggabungkan nilai-nilai demokratis dan HAM secara menyeluruh. Selain itu, budaya politik lama yang masih bertahan, minimnya akses informasi yang kredibel, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah media juga menjadi hambatan. Kurangnya aktivitas edukatif di luar sekolah turut mempersempit ruang pembentukan kesadaran publik. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan sistem pendidikan serta dukungan dari media dan komunitas untuk memperkuat pemahaman warga akan demokrasi dan hak asasi manusia.

Membangun pendidikan kewarganegaraan yang mampu menumbuhkan sikap kritis terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan

disesuaikan dengan realitas sosial. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mendorong pembentukan karakter, sikap reflektif, dan kemampuan bertindak secara sadar dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Langkah-Langkah Menumbuhkan Sikap Kritis Terhadap Demokrasi dan HAM

No.	Langkah-Langkah
1.	Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis
2.	Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Berbasis Penghargaan terhadap Keberagaman
3.	Mengintegrasikan Pendidikan dengan Prinsip-prinsip Demokrasi dan HAM
4.	Meningkatkan Literasi Media untuk Mengidentifikasi Misinformasi
5.	Menerapkan Metode Pembelajaran Partisipatif dan Kontekstual
6.	Penguatan kompetensi Guru
7.	Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan dalam Proses Pendidikan

Penerapan langkah-langkah strategis di atas, diharapkan pendidikan warga di Indonesia dapat menghasilkan individu yang tidak hanya memahami teori-teori demokrasi dan HAM, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara aktif dan bertanggung jawab. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang menekankan pada dialog, refleksi, dan kolaborasi lintas perbedaan agar siswa terbiasa berpikir terbuka dan menghargai perspektif orang lain. Guru juga perlu diberikan pelatihan untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam setiap mata pelajaran secara kontekstual. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter pada warga negara yang kritis, empatik, dan beradab.

Pembahasan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia cenderung lebih menekankan pada aspek teori dan aturan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif siswa dalam diskusi maupun pengambilan keputusan. Akibatnya, siswa hanya mengenal demokrasi dan hak asasi manusia secara konseptual, namun kesulitan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemikiran kritis siswa, terutama di era modern ini, agar mereka lebih sadar dan aktif dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi serta menghargai hak asasi manusia (Apriliani et al., 2021).

Penerapan nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam kurikulum sekolah di Indonesia masih sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih berorientasi pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya mengarah pada pembentukan sikap serta perilaku demokratis. Materi pembelajaran umumnya hanya menekankan pada aturan dan sejarah tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap permasalahan demokrasi dan HAM yang terjadi saat ini. Kondisi ini menyebabkan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan HAM menjadi kurang mendalam dan kurang berkembang.

Tradisi politik di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh sistem patronase dan gaya pemerintahan otoriter membuat masyarakat sulit mengembangkan kesadaran kritis terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya budaya dialog publik dan rendahnya literasi politik di kalangan warga, sehingga partisipasi masyarakat sering kali

bersifat pasif dan simbolik. Setelah era Orde Baru, campur tangan intelijen dan beberapa pelaku politik tertentu kerap menjadi penghalang bagi terciptanya proses demokrasi yang terbuka dan jujur (Bhakti, et, al, 2016).

Keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang jelas dan seimbang, ditambah dengan minimnya kemampuan masyarakat dalam memahami media, membuat pemahaman tentang demokrasi dan hak asasi manusia menjadi kurang tepat. Fenomena penyebaran informasi yang bias dan maraknya kesalahan informasi di media sosial semakin memperburuk kualitas literasi politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam memilah sumber informasi masih perlu ditingkatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Laksono (2020) menekankan bahwa peran media massa sangat krusial dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap politik dan sistem demokrasi.

Pembelajaran yang mendorong kesadaran kritis di luar institusi formal seperti sekolah, baik melalui komunitas warga maupun platform digital, belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat penguatan pendidikan kritis di ruang nonformal. Jika dioptimalkan, pendekatan pembelajaran nonformal ini dapat menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Padahal, ruang-ruang ini bisa menjadi sarana penting untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia serta mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan berbangsa.

Lembaga pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pendorong perubahan sosial, khususnya dalam menanamkan pemahaman mendalam mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Para pendidik, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, belum sepenuhnya mengoptimalkan perannya dalam membentuk cara berpikir kritis dan semangat kebangsaan di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dalam mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran demokratis di kalangan generasi muda (Ismayanti et al., 2019).

Pendidikan di era modern perlu memfokuskan diri pada penguatan kemampuan berpikir kritis. Hal ini agar peserta didik mampu menilai informasi secara jernih, memahami perbedaan pandangan, dan mengambil keputusan secara sadar berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Kemampuan ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam menyikapi informasi, bukan hanya sebagai penerima pasif (Apriliani et al., 2021).

Langkah-langkah menumbuhkan sikap kritis terhadap demokrasi dan HAM dapat dilakukan dengan upaya tertentu. Upaya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan di Indonesia dilakukan dengan mendorong siswa terlibat aktif dalam proses belajar, seperti melalui pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Selain itu, sinergi antara kurikulum, guru, dan lingkungan belajar juga diperlukan agar proses pembelajaran benar-benar mampu menumbuhkan kemandirian berpikir dan tanggung jawab sosial siswa. Meski begitu, hambatan seperti dominasi ujian dan kurangnya pemahaman guru masih menjadi tantangan yang harus dibenahi lewat pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan (Kollo & Suciptaningsih, 2024).

Menggunakan materi pembelajaran yang dirancang untuk merangsang pemikiran mendalam membantu siswa menjadi lebih terlibat dalam proses belajar, terutama dalam

menilai dan memahami berbagai informasi. Materi semacam ini tidak hanya meningkatkan kemampuan analisis, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar yang lebih tinggi pada diri siswa. Pendekatan ini menjadi lebih kuat ketika dipadukan dengan teknologi digital atau pembelajaran berbasis ICT, yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan secara luas dan berinteraksi dalam kegiatan belajar yang saling mendukung dan dinamis (Saputra & Salim, 2020). Dengan integrasi teknologi yang tepat, proses pembelajaran dapat menjadi lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital masa kini.

Secara umum, metode pengajaran yang dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis mendorong siswa agar tidak hanya menyerap informasi begitu saja, tetapi mampu memproses, menimbang, dan mempertanyakan informasi tersebut dengan cermat. Pendekatan ini sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi dan HAM melalui pembelajaran yang aktif dan penuh kesadaran. Pendidikan kewarganegaraan yang baik seharusnya membentuk rasa cinta tanah air yang berpijak pada penerimaan terhadap perbedaan dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Dalam hal ini, peran pendidik menjadi sangat penting dalam membimbing siswa agar memiliki kesadaran berbangsa yang inklusif dan menghargai martabat sesama warga negara (Ismayanti et al., 2019).

Dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, penting sekali menanamkan rasa nasionalisme yang didasarkan pada penghormatan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia. Guru memegang peran utama dalam membentuk sikap ini dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, seperti buku pelajaran, media massa, budaya, internet, kisah tokoh nasional, dan film yang mengandung nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, guru juga membentuk kelompok diskusi dengan nama-nama pahlawan untuk memperdalam pemahaman siswa mengenai nasionalisme. Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, PMR, seni tari, dan olahraga turut mendukung penguatan semangat cinta tanah air. Namun, tantangan terbesar datang dari arus globalisasi yang memperkenalkan berbagai budaya asing, sehingga perlu upaya ekstra agar nilai-nilai nasionalisme tetap kokoh dalam diri para pelajar (Ismayanti et al., 2019).

Pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dan HAM akan memberikan siswa pemahaman yang kuat tentang kebebasan, kesetaraan, dan pentingnya ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menghormati hak-hak dasar setiap individu. Selain mengenalkan konsep-konsep tersebut, pendidikan ini juga mengasah kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis, membuat keputusan yang matang, serta menerima perbedaan dengan terbuka. Tujuannya bukan hanya agar siswa tahu tentang demokrasi dan HAM, tapi juga supaya mereka mampu menilai dan mengkritisi penerapan prinsip-prinsip itu di dunia nyata, serta aktif berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Osler & Solhaug, 2018).

Gerber (2020) menyoroti pentingnya mengenalkan nilai-nilai HAM dan demokrasi sejak masa kanak-kanak agar generasi muda memiliki dasar yang kokoh untuk menghormati hak setiap manusia, mendukung perdamaian, serta bertekad melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Pengajaran yang menggabungkan konsep HAM dengan prinsip demokrasi ini juga berperan dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan keterlibatan aktif siswa terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Dengan demikian, pendidikan sejak dini menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan berkeadilan sosial.

Siswa sebagai subjek utama pembelajaran, siswa dalam proses belajar mengajar ditempatkan sebagai pusat perhatian utama. Dengan metode yang mengaitkan pembelajaran pada situasi nyata, siswa diajak untuk melatih kemampuan berpikir kritis melalui pemecahan

masalah, kerja sama tim, dan pengembangan ide kreatif. Meski begitu, hambatan seperti tekanan pada ujian formal dan keterbatasan pengetahuan guru tentang metode ini harus diselesaikan lewat pelatihan yang memadai dan dukungan yang konsisten.

Di era digital, literasi media menjadi keterampilan penting untuk mengidentifikasi dan menanggapi misinformasi yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Kemampuan ini tidak hanya membantu individu memahami isi informasi, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi secara lebih bijak dalam ruang publik digital. Sebuah studi pilot menunjukkan bahwa program literasi media online efektif dalam mengurangi kepercayaan terhadap berita palsu di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dalam pendidikan tercermin melalui berbagai pendekatan inovatif, seperti menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran dan mendorong berpikir kritis melalui metode kontekstual dan kolaboratif. Penggunaan bahan ajar berbasis keterampilan berpikir kritis mampu meningkatkan kemampuan analisis siswa. Di tingkat SD, pembelajaran tematik berbasis masalah efektif membentuk pemikiran kritis dalam konteks nyata. Sementara itu, integrasi teknologi dalam pembelajaran turut memperkuat kemampuan siswa untuk berpikir kritis secara interaktif. Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan ini mendukung pengembangan sikap aktif, reflektif, dan partisipatif siswa sesuai nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Cara belajar yang melibatkan siswa secara aktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat membantu mereka lebih mengerti serta terlibat dalam persoalan demokrasi dan hak asasi manusia. Metode ini mengajak siswa untuk berdiskusi, mengkaji situasi nyata, dan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan pengalaman mereka. Pendidikan tentang demokrasi dan HAM sebaiknya bersifat partisipatif, mengubah cara pandang, dan menyesuaikan dengan konteks agar materi terasa lebih nyata dan mudah dipahami. Dengan menggunakan teknik seperti diskusi kelompok, debat, dan simulasi, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan memahami isu-isu tersebut secara mendalam. Selain itu, pendekatan ini juga berupaya menanamkan nilai-nilai penting seperti saling menghargai, tidak diskriminatif, dan menjunjung keadilan.

Penerapan pendekatan kontekstual dan partisipatif dalam pembelajaran khususnya PKn, seperti diskusi, simulasi musyawarah, dan metode inkuiri, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap demokrasi dan HAM. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif siswa, memperkuat keterampilan berpikir kritis, serta menumbuhkan sikap demokratis dan toleran. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu dan sarana, upaya ini menegaskan bahwa pendidikan demokrasi dan HAM harus bersifat partisipatif, transformatif, dan kontekstual agar relevan dengan kehidupan peserta didik.

Seiring dengan perkembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah yang telah mengintegrasikan pendidikan HAM dan konsep demokrasi menjadi bagian penting dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pembelajaran PKn di sekolah tidak hanya mengajarkan siswa tentang hak-hak dasar manusia, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana sistem demokrasi berfungsi dan bagaimana siswa dapat berkontribusi secara aktif dalam memajukan nilai-nilai demokrasi dan HAM di masyarakat, oleh karena itu penguatan kompetensi guru, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan relevan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi) diperlukan untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan HAM, tetapi juga mendukung pengembangan sikap demokratis di kalangan siswa.

Guru khususnya guru PKn berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai HAM kepada siswa dengan cara menghubungkan konsep HAM dengan hak dan tanggung jawab

mereka, serta menangani masalah pelanggaran HAM di sekolah. Hal ini membuat siswa menjadi lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap mereka, seperti rasa hormat, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Guru juga dituntut untuk memasukkan isu HAM ke dalam pembelajaran, terutama di era digital, dengan menggunakan pendekatan kasus nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Walaupun ada kendala seperti kurangnya fasilitas teknologi dan pelatihan bagi guru, antusiasme siswa tetap tinggi. Oleh karena itu, pelatihan teknologi bagi guru sangat dibutuhkan agar pembelajaran PKn yang berfokus pada HAM bisa berjalan lebih efektif di zaman sekarang (Rangkoly & Situru, 2024).

Penerapan berbagai strategi dalam pendidikan PKn yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi menunjukkan bahwa penguatan kompetensi guru, pengembangan bahan ajar kontekstual, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan HAM, tetapi juga mendukung pengembangan sikap demokratis di kalangan siswa. Upaya ini juga menuntut adanya evaluasi berkelanjutan agar praktik pembelajaran benar-benar mencerminkan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan kesetaraan.

Kerja sama yang erat antara sekolah, orang tua, komunitas, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar pendidikan kewarganegaraan berjalan dengan baik. Sinergi ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak dini. Selain itu, meningkatkan kemampuan guru lewat pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang pendidikan HAM juga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pendidikan tersebut sukses.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan HAM sangat penting untuk membentuk warga yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Agar pendidikan ini efektif, perlu pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, penguatan kompetensi guru, serta keterlibatan berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Pendidikan yang menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, penghargaan terhadap keberagaman, dan literasi media dapat membantu siswa memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dalam kehidupan nyata. Tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan budaya politik lama harus diatasi dengan pelatihan guru dan kolaborasi yang kuat agar generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, E., Afandi, A., & Marlina, R. (2021). Memberdayakan Keterampilan Berpikir Kritis di Era Abad 21. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2020* (pp. 1045-1052). https://www.researchgate.net/publication/353014373_MEMBERDAYAKAN_KETERAMPILAN_BERPIKIR_KRITIS_DI_ERA_ABAD_21
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), Mei 2021. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34151>

- Bhakti, I. N., Mengko, D. M. M., Samego, I. S., Yanuarti, S., & Siregar, S. N. (2016). Intelijen dalam pusaran demokrasi di Indonesia pasca orde baru. *Journal of Political Research*, 13(1), 53-68. <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i1.211>
- Gerber, P. (2020). Why We Must Teach Human Rights in Early Childhood. *Human Rights Education Review*, 3(1), 1-21. <https://doi.org/10.7577/hrer.3840>
- Ibrizzahra, R. Q., Salam, D. M., Isnaeni, T. P., & Herlina, P. S. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Ismayanti, A., Sugiati, A., & Rukman, A. A. (2019). Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Siswa Sekolah Menengah Atas Nasional Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2), 64-71. <https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2387>
- Kollo, N., & Suciptaningsih, O. A. (2024). Keterampilan berpikir kritis siswa melalui penerapan kurikulum merdeka. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1452-1456. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3845>
- Laksono, P. (2020). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik. *Jurnal MDIAKITA*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448>
- Muhtaj, M. E., Siregar, M. F., Pa, R. B. B., & Rachman, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Ham*, 11(3), 369. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>
- Osler, A., & Solhaug, T. (2018). Children's human rights and diversity in schools: Framing and measuring. *Research in Comparative and International Education*, 13(2), 276-298. <https://doi.org/10.3390/educsci8020044>
- Patra, R. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 381-393. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>
- Rangkoly, S. A., & Situru, D. P. (2024). Peran Guru Ppkn Dalam Mengintegrasikan Isu Hak Asasi Manusia Pada Pembelajaran Di Era Digital Di Sd Is Kijne Wadio. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 355-360. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/9231>
- Saputra, H. N., & Salim, S. (2020). Penerapan bahan ajar berbasis keterampilan berpikir kritis. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 22-46. <https://doi.org/10.33650/pjp.v7i1.1078>
- Sitepu, T. E., Perangin-angin, R. B., & Nasriah, N. (2023). Pendekatan kontekstual dalam meningkatkan pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 145–155. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4248>